

Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia

Oleh:
Lili Romli

Abstract

The resurgent of Islamic parties occurs in the reform era because of many factors which are theological, sociological, historical, reformation and democratization. Unfortunately the resurgent of Islamic parties cannot be endorsed by the Islamic voters. This can be seen from a small and insignificant vote reached by the Islamic parties. In the 1999 general election, the Islamic parties only have 17,8 percent vote and in the 2004 general election only have 21,17 percent vote. This small and insignificant vote of the Islamic parties happened because of fragmentation of Islamic parties and ideological orientation change of Islamic voters.

Pendahuluan

Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pada pasca Orde Baru, ada beberapa faktor yang menjadi penjelas, yaitu faktor teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi. **Pertama**, faktor teologis. Dalam pandangan ini agama merupakan suatu yang *integrated*, yang bersatu tak terpisahkan dengan politik. Islam adalah *din wa daulah*, berdasarkan ini maka masalah kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah negara atau politik, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agama. Sebagai manifestasi dari pandangan ini adalah perlunya kekuasaan politik. Kekuasaan ini diperlukan dalam upaya untuk menerapkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, baik perdata maupun pidana. Dalam rangka itu maka diperlukan partai politik untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam. Dengan demikian, pendirian partai politik Islam merupakan panggilan dan perwujudan dari pandangan teologis tentang hubungan agama dan negara.

Kedua, faktor sosiologis. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas. Pemeluknya mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta orang. Dengan jumlah yang mayoritas tersebut sudah pantas dalam upaya penyaluran aspirasi politik sesuai dengan nilai-nilai dan perjuangan Islam. Dalam konteks ini maka partai politik Islam dianggap sebagai

wadah penyalur aspirasi perjuangan Islam. Sehubungan dengan itu maka pendirian partai politik Islam merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini karena secara sosiologis umat Islam di Indonesia merupakan pemeluk mayoritas dan mereka akan merasa nyaman dan aman apabila penyaluran aspirasi politik disampaikan melalui partai politik Islam.

Konteks sosiologis ini tampaknya digunakan oleh elit-elit politik Islam untuk mendirikan partai politik Islam. Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas tentu dengan sendirinya akan mendapat dukungan dari umat Islam. Oleh karena itu adanya partai-partai politik Islam secara otomatis akan didukung oleh umat Islam. Apalagi ditambah dengan perspektif teologis, di mana perlunya alat perjuangan untuk mewujudkan aspirasi Islam. Dengan konteks ini maka antara faktor sosiologis dan teologis bertemu, saling mengisi dan menunjang satu sama lain.

Ketiga, faktor historis. Dalam sejarah di Indonesia Islam merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam perlawanan menentang penjajah. Islam pada masa itu merupakan salah satu garda terdepan dalam mengusir penjajahan. Dalam rangka mengusir penjajahan tersebut diperlukan alat organisasi sebagai penyatu aspirasi dan tujuan. Maka tercatatlah berdirinya Sarekat Islam (SI), organisasi pertama kekuatan politik yang anggota terbanyak di antara organisasi-organisasi pergerakan lainnya.

Keempat, faktor reformasi. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Baru melahirkan era kebebasan. Dalam era ini setiap kelompok atau golongan diberi kesempatan untuk menyalurkan atau membentuk partai politik sesuai asas dan aspirasi politiknya. Kesempatan ini tampaknya tidak disia-siakan oleh para elite politik, termasuk elite politik Islam untuk mendirikan partai politik.

Islam dan Politik: Pendekatan Teoritis

Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. **Pertama**, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). **Kedua**, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). **Ketiga**, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*sekularistik*).¹

Paradigma **pertama** yang menyatakan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena melihat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga mencakup politik atau negara. Tuhan melalui Nabi Muhammad telah menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Karena Tuhan Maha Benar dan Maha Adil, maka aturan-aturannya pastilah benar dan adil. Karena manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi, maka manusia berkewajiban

untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu manusia harus taat dan tunduk pada Tuhan. Berdasarkan itu maka untuk mengelola negara, tinggal melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam pandangan kelompok ini, syari'ah dipahami sebagai totalitas yang *par excelent* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Karena itu legitimasi politik negara harus berdasarkan syari'ah.

Pendekatan **kedua** yang menyatakan bahwa antara agama dan negara saling terkait dan berhubungan berdasarkan pada argumen bahwa agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Begitupun, negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.² Para pemikir Islam yang termasuk dalam paradigma ini antara lain adalah Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali.

Ketiga adalah paradigma yang menyatakan perlunya adanya pemisahan antara agama dan negara. Paradigma ini menolak paradigma yang pertama dan paradigma yang kedua. Pelopor paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq, ulama dan pemikir dari Mesir. Dalam kalangan Islam, pemikiran tentang pemisahan antara agama dan negara yang dikemukakan oleh Ali Abdul Raziq ini bukan saja ditolak, tetapi juga bersifat kontroversial karena pandangan-pandangan dan hujah-hujah yang dilontarkannya tidak sesuai dengan sumber dan fakta yang ada. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam Wa Usul al-Hukm* mengemukakan bahwa: (1) syari'at Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktek duniawi; (2) Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan pada periode Nabi maupun Khulafaur Rashidin; (3) kekhilafahan bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi; (4)

¹ Din Syamsuddin menyebutnya atas ketiga hal tersebut terdiri dari paradigma *integrated*, *simbiotik*, dan *sekularistik*. Sementara Umaruddin Masdar menyebutnya dengan konservatif, modernis, dan liberal. Lihat Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol.IV tahun 1993. Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

² Din Syamsuddin, *op.cit.*, hlm.6.

kekhalfahan tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam bagian lain, Ali Abdul Raziq menolak keras pendapat bahwa Nabi pernah mendirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Misi dari Nabi Muhammad adalah semata-mata utusan Tuhan. Ia bukan seorang kepala negara atau pemimpin politik.³

Pendapat Ali Abdul Raziq tersebut mendapat kritikan tajam dari Dhiya Din ar-Rais. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa al-Khalifah fi al-'Ashr al-Hadist*, ia mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Ali Abdul Raziq hanyalah sekedar pernyataan-pernyataan kosong tanpa pijakan dalil. Ali Abdul Raziq lebih layak disebut sebagai dongeng dan khurafat. Di sini Dhiya Din memberikan bukti-bukti dengan mengutip dalil dan kesepakatan atau ijma ulama tentang adanya negara Islam dan bahwa Nabi bukan hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai Kepala Negara.⁴

Meskipun tulisan Ali Abdul Raziq mendapat kecaman dan kritikan, tetapi garis pemikirannya terus berlanjut. Di antaranya yang segaris dengan pemikiran Raziq adalah Thoha Husein dan Qomaruddin Khan. Thoha Husein berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mengatur sistem pemerintahan baik secara umum maupun secara khusus. Pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafaur Rashidin bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada wahyu, tetapi pemerintahan insani, sehingga tidak pantas dianggap sakral dan suci.⁵

Sedangkan Qamaruddin Khan berpendapat bahwa teori politik Islam tidak muncul dari Al-Qur'an tetapi dari keadaan

dan bahwa negara bukanlah merupakan hal yang dipaksakan secara Ilahiah atau pun sangat dibutuhkan sebagai institusi sosial. Kaum muslimin perlu memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang telah tertetapkan mengenai percampur-adukan agama dan politik. Klaim bahwa Islam merupakan sebuah panduan agama dan politik yang harmonis adalah sebuah slogan modern, yang jejaknya tidak dapat ditemukan dalam sejarah masa lalu Islam. Istilah "Negara Islam" tidak pernah digunakan dalam teori atau praktek ilmu politik muslim sebelum abad ke-20.⁶

Eickelman dan Piscatori sendiri tampak setuju dengan pendapat di atas. Hal ini terlihat dari ketidaksetujuannya dengan konsep menyatunya agama dan politik. Dalam konteks ini mereka memberikan beberapa alasan. *Pertama*, ia melebih-lebihkan keunikan politik muslim. Agama jelas merupakan perkara penting bagi kehidupan politik rakyat seluruh dunia, tidak hanya bagi umat Islam. *Kedua*, penekanan pada *al-din wa al-daulah* tanpa disadari mengekalkan prasangka para orientalis bahwa politik muslim tidak seperti politik lain, adalah tidak diarahkan oleh perhitungan-perhitungan berdasarkan kepentingan rasional. *Ketiga*, asumsi-asumsi *al-din wa al-daulah* memberi kontribusi terhadap pendapat bahwa politik muslim adalah sebuah jaringan tidak bertepi, tidak bisa dibedakan bagian-bagiannya karena saling interpenetrasi antara agama dan politik.⁷

Abdelwahab juga setuju bahwa konsep negara Islam harus ditinggalkan sama sekali. Juga harus meninggalkan ilusi milenium yang dijanjikan oleh pembaharu negara utopia yang menghadirkan orang saleh dan suci secara ajaib untuk mengembalikan zaman keemasan Islam yang sudah lama hilang. Kesalahpahaman utama pemikir politik Islam kontemporer terletak pada asumsi bahwa negara

³ Din Syamsuddin, *op.cit.*, hlm.8.

⁴ Buku tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Khilafah*, (Bandung: Pustaka, 1985).

⁵ Untuk melihat lebih jauh pemikiran Thoha Husein lihat Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekulerisme: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thoha Husein*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

⁶ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 67-68.

⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

berdasarkan prinsip-prinsip Islam tidak lain adalah negara yang memaksakan untuk hidup sesuai dengan Islam. Yang benar adalah tujuan komunitas politik Islam untuk memberi kemungkinan kepada umat Islam secara individual untuk hidup sesuai Islam dan melindungi mereka dari paksaan yang cenderung meruntuhkan komitmen mereka pada Islam.⁸

Dari keseluruhan penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam pemikiran politik Islam, masalah hubungan agama dan negara, terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan, dan paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah.⁹

Dalam kaitan dengan tulisan ini pembahasan difokuskan pada paradigma pertama, yaitu bersatunya antara agama dan negara atau politik. Paradigma ini disebut pula sebagai *integrated paradigm*. Paradigma ini berpandangan bahwa antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga mencakup politik atau negara. Tuhan melalui Nabi Muhammad telah

menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Karena Tuhan Maha Benar dan Maha Adil, maka aturan-aturannya pastilah benar dan adil. Karena manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi, maka manusia berkewajiban untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu manusia harus taat dan tunduk pada Tuhan. Berdasarkan itu maka untuk mengelola negara, tinggal melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam pandangan kelompok ini, syari'ah (hukum Islam) dipahami sebagai totalitas yang *par excellent* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Karena itu legitimasi politik negara harus berdasarkan syari'ah (hukum Islam).

Paradigma bersatunya agama dan negara ini dalam melakukan praktek politik menggunakan pendekatan formalistik. Pendekatan formalistik adalah pendekatan yang cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara dengan simbolisme keagamaan, berbeda dengan pendekatan substansialistik yang cenderung menekankan isi daripada bentuk. Pendekatan substansialistik tidak mempersoalkan bagaimana bentuk atau format dari negara itu, tetapi memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisinya dengan etika dan moralitas agama.

Dalam konteks politik, menurut M. Syafii Anwar, pendekatan formalistik menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik yang dibayangkan (*imagined Islamic polity*), seperti terwujudnya suatu sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik Islam, dan lain-lain.¹⁰ Sehubungan dengan itu maka mereka sangat menekankan ideologi-sasi dan politisasi simbolisme keagamaan secara formal. Doktrin keagamaan

⁸ Abdelwahab el-Affendy, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 89-90.

⁹ Dalam melihat ketiga paradigma ini masing-masing penulis memberikan sebutan yang berbeda. Din Syamsuddin menyebutnya atas ketiga hal tersebut terdiri dari paradigma *integrated*, *simbiotik*, dan *sekularistik*. Sementara Umaruddin Masdar menyebutnya dengan konservatif, modernis, dan liberal. Lihat Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol.IV tahun 1993. Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹⁰ M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.144-145.

diterjemahkan bukan sekedar rumusan teologis tetapi juga suatu sistem keimanan dan tindakan politik yang komprehensif dan eksklusif.

Secara garis besar pendekatan formalistik ini berpandangan: Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan sistem politik modern diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan negara Islam.¹¹ Pendekatan formalistik ini menurut terminologi Gulalp masuk dalam kategori "Islam politik". Islam politik, menurut Gulalp, adalah Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik yang kemudian menjelma dalam bentuk partai politik.¹² Dengan demikian Islam politik adalah Islam yang berusaha diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang legislatif dan eksekutif.

Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pasca Orde Baru ini dapat dijelaskan dengan pendekatan Islam formalistik atau pendekatan Islam politik. Pendekatan ini bisa membantu memahami bangkitnya kembali partai-partai politik Islam era reformasi ini. Karena bagaimanapun bangkitnya kembali partai-partai politik Islam ini dapat dikatakan sebagai fenomena bangkitnya kembali Islam politik.

Geneologi Partai Politik Islam di Indonesia

Setelah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 yang mem-

perbolehkan berdirinya partai-partai politik, umat Islam merespons Maklumat tersebut dengan mendirikan partai politik Masyumi. Berdirinya Masyumi ini dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib umat Islam Indonesia. Partai politik ini didukung, antara lain, oleh dua kekuatan ormas besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Namun dalam perjalanannya, para pendukung partai Masyumi keluar satu persatu. Bermula dengan keluarnya PSII tahun 1947, menyusul kemudian NU tahun 1952¹³. Akibatnya pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama semenjak Indonesia merdeka, kekuatan politik Islam menjadai terpecah-pecah, bukan hanya Masyumi, NU, PSII, Perti, tetapi juga ada PPTI, dan AKUI. Tentu saja perpecahan di kalangan partai-partai Islam ini mengakibatkan kekuatan Islam menjadi lemah.

Dampak perpecahan itu pada gilirannya akan membuat umat Islam menjadi bingung karena siapa sesungguhnya yang menjadi representasi dari Islam. Ini terjadi karena partai-partai Islam itu semuanya mengklaim sebagai perwujudan representasi dan aspirasi Islam. Hasil pemilu menunjukkan ternyata partai-partai Islam tidak memperoleh dukungan suara mayoritas dari umat Islam. Masyumi hanya memperoleh suara 20,9%, NU 8,4%, PSII 2,0%, Perti 1,3%, serta PPTI dan AKUI masing-masing memperoleh suara 0,2%.¹⁴

Masa Demokrasi Terpimpin, partai-partai Islam dipaksa untuk mendukung ideologi Nasakom. Dalam hal ini partai-partai Islam terpecah atas dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung ideologi Nasakom yang diwakili oleh NU dan kelompok yang menentang yang diwakili oleh Masyumi. Akibat penolakan itu, pada tahun 1960 Soekarno membubarkan

¹¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hlm.12.

¹² Halil Gulalp, "Political Islam in Turkey: The Rise and Fall of The Rifah Party", *The Muslim World*, Hartford Seminary, Vol89, No.1, 1999. Dikutip dari Azyumardi Azra, "Islam di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi", dalam Abdul Mu'nim D.Z., *Islam di Tengah Arus Transisi*, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm.xiii.

¹³ Keluarnya NU dari Masyumi karena perebutan kursi Menteri Agama, yang seharusnya diberikan kepada NU bukan kepada Muhammadiyah. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafitipers, 1987).

¹⁴ Hebert Feith, *The Indonesian Election of 1955*, (Ithaca: Cornell University Press, 1957), hlm.58.

Masyumi. Dengan bubarnya Masyumi praktis kekuatan politik Islam terpinggirkan dari arena kekuasaan. Hal ini karena meskipun NU berada dalam lingkaran kekuasaan, ternyata ia tidak mempunyai peranan dan kekuatan apa pun.¹⁵

Ketika Orde Baru tampil memegang kendali kekuasaan, umat Islam mempunyai harapan besar akan tampilnya kembali Masyumi. Harapan itu berubah menjadi kekecewaan karena rezim Orde Baru tidak memperbolehkan Masyumi tampil kembali sebagai partai politik. Sebagai gantinya, rezim Orde Baru mengizinkan berdirinya Parmusi. Itupun dengan catatan: tokoh-tokoh eks-Masyumi dilarang terlibat dalam kepengurusan partai.¹⁶ Tindakan pemerintah ternyata tidak hanya sampai di situ. Demi alasan menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Orde Baru kemudian melakukan restrukturisasi sistem kepartaian. Dengan adanya kebijaksanaan ini, partai-partai Islam (Parmusi, NU, PSII, dan Perti) dan juga partai-partai yang lainnya (PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI) dipaksa melakukan fusi. Keempat partai Islam yaitu Parmusi, NU, PSII dan Perti bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian PPP merupakan satu-satunya kekuatan politik Islam.

Proses marginalisasi yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap Islam politik ternyata terus berlanjut, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan de-ideologisasi. Dalam kebijaksanaan ini, partai-partai politik tidak diperbolehkan menggunakan asas lain selain asas Pancasila. Akibat kebijaksanaan itu maka partai-partai politik tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya PPP, sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam,

meninggalkan asas Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila. Begitupun dengan lambangnya dari “Ka’bah” diganti menjadi “Bintang” pada tahun 1985. Lambang Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila yang terdapat dalam “tubuh Garuda Pancasila”. Pergantian ideologi dan lambang PPP tersebut, menurut Nasir Tamara, merupakan proses deislamisasi politik dan depolitisasi Islam.¹⁷

Rangkaian tindakan rezim Orde Baru yang secara sistematis melakukan marginalisasi terhadap Islam politik tersebut sebangun dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam.¹⁸ Rezim Orde Baru berpandangan bahwa keterlibatan Islam dalam politik cenderung mengganggu kestabilan politik, dan karena itu mengganggu gerak pembangunan. Oleh karena itu pandangan rezim Orde Baru terhadap Islam adalah pandangan yang menganggap Islam sebagai suatu agama dalam pengertian ibadah dan soal-soal kemasyarakatan yang tidak bersifat politik praktis. Berdasarkan itu maka rezim Orde Baru akan mendukung sepenuhnya kegiatan umat Islam yang berhubungan dengan masalah ibadah dan kemasyarakatan, tetapi yang berkaitan dengan politik akan membatasinya bahkan melarangnya.¹⁹

Terpinggirnya Islam politik dalam percaturan nasional, ternyata membawa dampak lain bagi perkembangan Islam di Indonesia. Artinya, meskipun perkembangan Islam dalam bidang politik kurang

¹⁵ Para pengamat menilai bahwa NU menerima ideologi Nasakom sebagai sikap politik yang oportunistik. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafitipers, 1987).

¹⁶ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan baru Islam*, (Jakarta: Mizan, 1986), hlm.108.

¹⁷ Nasir Tamara, “Sejarah Politik Islam Orde Baru”, *Prisma*, No.5/1988, hlm.45.

¹⁸ Tentang sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam, lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985).

¹⁹ Atas nasehat Snouck Horgronje, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijaksanaan pada umat Islam Indonesia. Pertama, dalam bidang ibadah, pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Kedua, dalam bidang politik atau ketatanegaraan, pemerintah kolonial melarang setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam. Lihat Aqib Suminto, *op.cit.*, hlm.12.

menggembirakan akibat serangkaian kebijaksanaan yang dilakukan rezim Orde Baru, tetapi dalam dimensi ritual dan kemasyarakatan mengalami perkembangan yang pesat. Ini dapat dilihat dengan semakin maraknya kehidupan keagamaan, seperti semakin meningkatnya orang pergi haji dari kalangan priyayi, banyaknya bangunan masjid, banyaknya kelompok studi Islam, dan lain-lain. Sehingga akibat berkembangnya kegiatan keagamaan tersebut, menurut Kuntowijoyo, telah terjadi konvergensi di kalangan kaum santri dan kaum abangan, antara tradisional dan modernis.²⁰

Maraknya kehidupan keagamaan tersebut dampak dari gerakan Islam kultural.²¹ Gerakan ini menawarkan wacana bahwa gerakan Islam tidaklah harus berkuat dalam dataran politik, tetapi dalam dataran kultural. Dengan Islam sebagai gerakan kultural maka Islam hadir dalam kehidupan bernegara sebagai nilai dan sumber etik. Dengan dikembangkannya pendekatan Islam kultural bukanlah berarti mengosongkan sama sekali ruang kesadaran umat dari politik. Kesadaran politik tetap ada dan dikembangkan, hanya saja ia tidak terpusat dalam bentuk politik praktis yang bersifat temporer, jangka pendek, dan secara sempit mengembangkan politik partisan. Dalam konsep Islam kultural, *power politics* bukanlah satu-satunya alternatif bagi perjuangan Islam di Indonesia. Tersedia berbagai peluang dan sarana bagi keberhasilan perjuangan umat Islam, antara lain melalui dakwah,

pendidikan, sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Munculnya Kembali Partai Politik Islam Era Reformasi

Dengan berkembangnya gerakan Islam kultural pada masa Orde Baru, banyak pengamat menilai bahwa kekuatan Islam politik tidak akan muncul lagi. Apalagi setelah PPP sebagai satu-satunya representasi kekuatan Islam politik sudah menanggalkan asas Islam dan menerima asas Pancasila. Taufik Abdullah mengatakan bahwa dengan PPP menerima Pancasila sebagai asasnya maka hal itu merupakan “halaman akhir Islam politik di Indonesia”.²² Dengan analisis yang berbeda namun dalam format yang sama dinyatakan pula oleh R. William Liddle dalam tulisannya yang berjudul *Skripturalisme Media Dakwah*.²³ Dalam tulisan ini ia mengemukakan tesis bahwa kelompok skripturalisme (kelompok Islam formalistik) tidak akan berkembang, hal ini karena ada tiga hambatan yang akan dihadapi, yaitu: (1) komunitas abangan, yang meski semakin sedikit namun masih tetap vital; (2) santri tradisional yang tetap akomodasionis, dan (3) kalangan modernis sendiri.²⁴

Tesis Liddle itu memang ditulis saat mesra-mesranya “bulan madu” antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Semua orang pun, saya kira, akan setuju dengan tesis tersebut. Tetapi ketika angin reformasi menerpa pemerintah Orde Baru, yang menyebabkan jatuhnya Soeharto, keberlakuan tesis tersebut menumbuhkan pertanyaan: apakah masih relevan tesis tersebut? Hal itu karena pada masa pasca Orde Baru ini telah muncul partai-partai politik Islam.

²⁰ Lihat kata pengantar Kuntowijoyo dalam buku Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Jakarta, 1994).

²¹ Gerakan Islam kultural ini di antaranya dipelopori oleh Nurcholis Madjid dan Abdurahman Wahid. Untuk melihat bagaimana pemikiran kedua orang tersebut dapat dibaca dalam buku Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*, (Jakarta: Mizan, 1986), M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), dan Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta; Paramadina, 1999).

²² Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.2.

²³ Artikel ini dibukukan dalam buku kumpulan karangan R. William Liddle yang diterbitkan oleh Sinar Harapan tahun 1997. Buku tersebut berjudul *Islam, Politik, dan Modernisasi*.

²⁴ R. William Liddle, *Ibid.*, hlm.127.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru, akibat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, telah terjadi ledakan partisipasi politik. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan masa akar rumput tetapi juga menghinggapi kalangan elite politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elite politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik, tak terkecuali elite Islam. Partai-partai politik Islam yang muncul pada era reformasi ini mencapai 32, dan dari jumlah tersebut yang lolos Pemilu 1999 sebanyak 17 partai, yaitu PPP, PBB, PK, PUI, PSII, PSII 1905, PNU, PKU, Partai Politik Islam Masyumi, PMB, PAY, PID, PIB, KAMI, PP, PUMI, dan Partai SUNI.

Fenomena berdirinya partai-partai politik, khususnya yang berbasis Islam, dianggap sebagai bangkitnya politik aliran. Dikatakan sebagai bangkitnya kembali politik aliran karena selama Orde Baru, politik aliran diberangus. Pada masa itu, rezim Orde Baru melakukan kebijakan dealiranisasi dengan serangkaian kebijakan: depolitisasi massa, *floating mass*, dan de-ideologisasi dengan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Kini setelah rezim Orde Baru jatuh, aliran-aliran politik itu, termasuk aliran politik Islam, bangkit kembali dengan wujud berdirinya partai-partai politik Islam. Sehubungan dengan itu, Th. Sumartana mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berdasarkan agama. **Pertama**, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai. **Kedua**, karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama tersebut. **Ketiga**, karena umat agama tersebut merasa lebih nyaman dengan pemimpin politik yang lahir dari komunitasnya sendiri dan

tidak percaya manakala politik dikuasai oleh golongan agama lain.²⁵

Dalam konteks berdirinya partai-partai Islam era reformasi ini ada beberapa hal sebagai penjelas. Berdirinya partai-partai Islam berkaitan dengan realitas sosial yang menjadi tempat hidup umat, yang tidak ada jalan untuk menghadapinya kecuali dengan memberi kesempatan bagi munculnya partai Islam. Di sana terdapat kaidah agung dari kalangan masyarakat, yang membentuk kehidupan mereka di bawah naungan ajaran-ajaran Islam. Partai Islam merupakan bentuk yang terkonsep dalam aktivitas politik agama untuk mengekspresikan keinginan tersebut.

Berdirinya partai-partai Islam berkaitan juga dengan realitas ideologis. Realitas ini yang mengharuskan pembentukan partai Islam. Seorang muslim dalam kehidupan praktisnya diberikan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan kecuali melalui sistem kehidupan Islami. Untuk sampai pada tujuan tersebut maka harus diberikan kesempatan untuk merealisasikan programnya dengan cara yang dapat diterima baik dari segi politik maupun demokrasi.

Di samping itu, seorang muslim berkecimpung dalam aktivitas politik merupakan bagian dari ketaatan pada agama. Hal ini berbeda dengan agama Kristen, yang membedakan antara aktivitas agama dan dunia. Dalam Islam, bagi seorang muslim yang sejati adalah yang memenuhi tuntutan-tuntutan agamanya dan sekaligus dunianya. Dalam konteks ini maka partai Islam mendapatkan dalam ajaran-ajaran Islam kandungan akidah yang mewarnai program politik, ekonomi dan sosial yang dicanangkan.²⁶

Selain itu, pembentukan partai Islam juga tidak bertentangan dengan

²⁵ Th. Sumartana, "Menakar Signifikansi Partai Politik Agama dan Partai Pluralis dalam Pemilu 1999 di Indonesia", dalam, Arief Subhan, ed., *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LSAF, 1999), hlm.101.

²⁶ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 407-410.

prinsip-prinsip demokrasi. Dalam negara yang menganut demokrasi, setiap kelompok maupun golongan diakui keberadaannya untuk membentuk organisasi kekuatan politik yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Hal ini didukung pula dengan perundang-undangan di mana tidak ada larangan membentuk partai politik berdasarkan agama asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Keberadaan partai Islam tentu saja tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi dilihat dari tujuan dan program pendirian partai Islam tidak ada yang menyebutkan mereka akan mendirikan negara Islam atau mengganti ideologi Pancasila. Dengan demikian keberadaan partai Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nurcholis Madjid sangat menyayangkan dengan berdirinya kembali partai-partai Islam. Bahkan lebih jauh ia mengatakan bahwa pendirian partai-partai Islam tersebut sebagai gejala tumbuhnya komunalisme. Penilaian Nurcholis seperti itu bisa dipahami. Hal ini karena selama ini ia dikenal sebagai orang yang berpandangan tidak perlu adanya partai politik Islam. Slogan yang terkenal adalah: *Islam Yes. Partai Islam No.*²⁷

Sementara di kalangan non-Islam, dengan berdirinya partai-partai Islam ternyata menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ini tercermin dari tulisan Th. Sumartana dan Frans Magnis Suseno. Dalam tulisannya Sumartana mengatakan bahwa bisakah partai Islam yang muncul saat ini memberikan payung bagi golongan minoritas dan memberi jaminan tidak akan ada perlakuan diskriminatif kepada golongan-golongan minoritas. Ia berpendapat bahwa banyak kesangsian tergambar dalam diskursus tentang nasib masa depan golongan minoritas. Ia bertanya: "Jika Islam berkuasa apakah ada

jaminan bagi tempat, kedudukan serta peran mereka di masyarakat dan negara di masa depan? Apakah hak-hak mereka terlindungi? Apakah kesetaraan akan dijamin?"²⁸ Frans Magnis Suseno juga khawatir akan munculnya kembali gagasan negara Islam. Menurutnya, bila gagasan negara Islam muncul kembali merupakan pertanda kemunduran dalam proses modernisasi bangsa, suatu gejala yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Di Indonesia, memang golongan non-Muslim terutama Kristen dan Katolik khawatir dengan gagasan negara Islam. Kekhawatiran ini bisa dimengerti karena memang dalam sejarah politik di Indonesia partai-partai Islam pernah memperjuangkan dasar negara Islam. Oleh karena itu ketika Indonesia pasca Orde Baru ini berdiri partai-partai Islam, mereka merasa khawatir jangan-jangan sejarah berulang kembali di mana partai-partai Islam akan kembali memperjuangkan dasar negara Islam. Benarkah demikian?

Ranah Perjuangan Piagam Jakarta

Pada era reformasi ini partai-partai Islam yang menekankan pendekatan formalistik memperjuangkan kembali Piagam Jakarta dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2000. Namun partai Islam yang memperjuangkan Piagam Jakarta hanya PPP dan PBB serta partai-partai Islam yang tidak memperoleh kursi, seperti PUI, PSII, dan Partai Islam Masyumi; sedangkan partai-partai Islam lainnya kurang mendukung perjuangan tersebut.

Apabila kita mengikuti pengelompokan partai-partai politik Islam era reformasi yang terdiri dari (1) kelompok tradisionalis, (2) kelompok modernis, dan (3) kelompok revivalis, maka ternyata sikap mereka terhadap Piagam Jakarta berbeda-beda. Kelompok tradisionalis, meskipun dalam sejarah perjuangannya pernah dengan tegas memperjuangkan Piagam Jakarta, dari semenjak awal

²⁷ Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. (Bandung: Mizan, 1987). Gagasan Nurcholis ini lebih jauh dibahas oleh Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987).

²⁸ Th. Sumartana, "Politik Islam dan Pluralisme Bangsa", dalam *Majalah D&R*, 15 Agustus 1998.

Kemerdekaan sampai awal Orde Baru, kini pada era reformasi ini (pada ST MPR 2000) tidak lagi memperjuangkan Piagam Jakarta. Bukan hanya itu saja bahkan kelompok ini sebagai salah satu kelompok yang menentang masuknya kembali Piagam Jakarta. Bagi kelompok tradisionalis perjuangan memasukkan kembali Piagam Jakarta adalah sesuatu yang *setback*.

Dengan tidak lagi memperjuangkan kembali atau menolak Piagam Jakarta tersebut berarti kelompok Islam tradisionalis ini mengalami pergeseran pemikiran yang bersifat ideologis dalam melihat Islam dalam kehidupan bernegara. Padahal pada masa lalu kelompok ini termasuk yang keras memperjuangkan Piagam Jakarta. Dengan adanya pergeseran ini maka meskipun mereka secara formal membentuk partai-partai politik Islam, tetapi dengan demikian pembentukan itu tidak ada kaitannya dengan usaha mendirikan atau memperjuangkan kembali Piagam Jakarta. Pembentukan partai-partai Islam, dengan demikian, hanya berkaitan dengan upaya representasi kekuatan Islam dalam parlemen atau eksekutif.

Berbeda dengan kelompok tradisionalis yang menentang Piagam Jakarta, maka bagi kelompok Islam fundamentalis (PK) adalah meskipun mendukung Piagam Jakarta masuk dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945, tetapi dukungan itu dalam arti substansi bukan bentuk (kata). Oleh karena itu yang diperjuangkan kelompok fundamentalis bukan Piagam Jakarta *an sich*. Karena bagi kelompok ini persoalan bahasa (istilah atau kata Piagam Jakarta) bisa dicari solusinya, yang penting adalah isi dari pasal tersebut. Dalam konteks itu kelompok ini lalu mengusulkan bentuk kompromi, yaitu dengan mengusulkan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing".

Berbeda dengan kedua kelompok di atas, kelompok modernis tetap berusaha memperjuangkan Piagam Jakarta. Dalam arti kelompok ini dari dulu hingga saat ini tetap memperjuangkan Piagam Jakarta

masuk dalam UUD 1945. Oleh karena itu ketika ada Amandemen UUD 1945, mereka mengusulkan agar Piagam Jakarta masuk dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945. Kelompok ini, baik yang ada di dalam MPR, yaitu PPP dan PBB, maupun yang tidak memperoleh kursi di MPR seperti PUI, Partai Islam Masyumi, PSII, dan lain-lain terus berusaha berjuang agar Piagam Jakarta masuk dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945.

Sikap kelompok modernis yang tetap memperjuangkan kembali Piagam Jakarta ini menunjukkan konsistensi perjuangan mereka. Apabila kelompok tradisionalis berhenti dalam memperjuangkan Piagam Jakarta, maka kelompok modernis dari semenjak awal kemerdekaan hingga era reformasi ini tetap terus memperjuangkan Piagam Jakarta. Namun demikian dalam memperjuangkan Piagam Jakarta tersebut terdapat pergeseran. Artinya perjuangan mengusulkan kembali Piagam Jakarta bukan dalam rangka ingin mendirikan negara Islam. Kelompok ini tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, Piagam Jakarta cukup masuk dalam Pasal 29 Ayat (1), tidak dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun dalam memperjuangkan kembali Piagam Jakarta, baik PPP maupun PBB, tidak merumuskan secara jelas dan sistematis mengenai bagaimana pendirian itu diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah nanti Piagam Jakarta mengatur hukum perdata dan pidana, atau hanya perdata saja. Atau lebih luas dari itu. Hal-hal itu tidak dikemukakan oleh PPP dan PBB dalam memberikan alasan memasukkan kembali Piagam Jakarta pada UUD 1945. Di samping itu juga mereka tidak menjelaskan bagaimana cara menjabarkan Piagam Jakarta apabila dipraktekkan. Akibat tidak ada penjelasan itu terdapat kesan bahwa memperjuangkan Piagam Jakarta hanya sekedar simbol. Kemudian muncul kesan bahwa perjuangan PPP dan PBB tersebut adalah dalam upaya "politik pencitraan",

yang menunjukkan bahwa mereka adalah partai politik Islam.

Terlepas dari hal tersebut perjuangan kelompok modernis dalam memperjuangkan Piagam Jakarta ini mendapat dukungan dari ormas-ormas Islam, meskipun ormas Islam kecil dan Partai-Partai Islam yang tidak memperoleh kursi. Tetapi mereka tidak mendapat dukungan dari kelompok tradisionalis dan fundamentalis. Di samping itu kalangan Islam substansialistik (PAN dan PKB) dan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta beberapa tokoh gerakan Islam kultural, seperti Nurcholis Madjid, tidak mendukung dan menolak Piagam Jakarta yang diperjuangkan oleh kalangan modernis.

Memang, persoalan hubungan agama (Islam) dan negara di dunia Islam, masih belum selesai. Di kalangan pemikir Islam ada tiga pandangan tentang hubungan agama dan negara dalam dunia Islam, yaitu *integrated*, simbiotik, dan sekularistik. Ketiga pandangan tersebut mewarnai pula padangan umat Islam Indonesia tentang hubungan agama dan negara. Di Indonesia, secara garis besar, yang kemudian terjadi benturan adalah antara pandangan *integrated* dan sekularistik. Sedangkan pandangan yang simbiotik, kemudian lebih dekat ke pandangan sekularistik dengan menggunakan pendekatan Islam kultural.

Benturan pandangan antara sekularistik dan *integrated*, bila ditelusuri dalam sejarah Indonesia, sudah terjadi semenjak zaman pergerakan Indonesia. Pada masa itu telah terjadi perdebatan yang sengit antara Muhammad Natsir (sebagai representasi pandangan *integrated*) dengan Soekarno (sebagai representasi pandangan sekularistik) tentang masalah hubungan agama dan negara. Kedua tokoh pergerakan ini terlibat perdebatan yang sengit tentang hubungan agama dan negara. Natsir berpendapat bahwa agama dan negara merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan, sedangkan Soekarno berpendapat sebaliknya. Kemudian Soekarno

dalam upaya membela pendapatnya mengutip pendapat Ali Abdul Raziq dan Kemal Attaturk, tokoh dan Bapak gerakan sekularisasi Turki.²⁹ Perdebatan itu kemudian berlanjut secara formal di BPUPKI dan PPKI tahun 1945, dan kemudian juga terjadi di Konstituante pada tahun 1957-1959.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan masalah hubungan agama dan negara sudah lama terjadi. Sebenarnya, ketika BPUPKI berhasil merumuskan Piagam Jakarta, merupakan bentuk jalan tengah untuk menengahi aspirasi yang berbeda antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Jalan tengah ini karena kemudian dihilangkan dari UUD 1945, membuat umat Islam terus berjuang agar jalan tengah itu kembali ke UUD 1945. Inilah yang kemudian terjadi ketika dalam Konstituante pemerintah mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan pada awal Orde Baru, umat Islam menuntut agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke UUD 1945. Peristiwa yang sama juga terjadi pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2000, di mana PPP dan PBB menuntut agar Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945. Tidak seperti tuntutan-tuntutan sebelumnya, tuntutan PPP dan PBB memasukkan Piagam Jakarta dalam UUD 1945 cukup dalam Pasal 29 ayat (1), tidak pada Pembukaan UUD 1945. Selain itu juga mereka menegaskan bahwa tuntutan itu bukan bermaksud untuk mengganti ideologi Pancasila dan mendirikan negara Islam.

Dengan adanya perjuangan PPP dan PBB tentang Piagam Jakarta, menunjukkan bahwa setiap partai Islam akan selalu memperjuangkan Piagam Jakarta. Tampaknya bagi partai-partai Islam, Piagam Jakarta merupakan suatu simbol keislaman yang merupakan warisan perjuangan golongan Islam di BPUPKI

²⁹ Tentang perdebatan antara Natsir dan Soekarno dapat dibaca dalam buku Ahmad Suhelmi, *Natsir Vs Soekarno*, (Jakarta: Darul Falah, 2000). Dalam buku ini Ahmad Suhelmi membahas perdebatan kedua tokoh ini dengan melihat latar belakang sosialisasi pendidikan politiknya.

yang harus terus diperjuangkan setiap ada kesempatan. Seperti tercatat dalam sejarah, partai-partai Islam setiap ada kesempatan, baik itu pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, selalu memperjuangkan Piagam Jakarta, meskipun kemudian mengalami kegagalan. Saat ini pun pada era reformasi ini, kembali partai-partai Islam memperjuangkan kembali Piagam Jakarta.

Persoalannya adalah, ketika mereka memperjuangkan Piagam Jakarta, mereka dalam memberikan argumentasi-argumentasi selalu diulang-ulang tanpa memberikan alasan lebih jauh bagaimana konsep Piagam Jakarta itu apabila nanti diaplikasikan. Sejauh mana ruang lingkup dan penjabaran dari Piagam Jakarta? Di sinilah seharusnya partai-partai Islam memberikan argumentasi secara sistematis tentang ruang lingkup dan penjabaran Piagam Jakarta. Argumen yang disampaikan selama ini berkuat pada bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan; bahwa Piagam Jakarta merupakan jiwa dari UUD 1945; bahwa Piagam Jakarta sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959; dan bahwa Piagam Jakarta hanya untuk umat Islam serta tidak bermaksud untuk mendirikan negara Islam.

Yang perlu diperhatikan bahwa dewasa ini persoalan Piagam Jakarta tampaknya kurang memperoleh dukungan yang signifikan dari umat Islam secara keseluruhan. Kurangnya dukungan itu terkait dengan perubahan orientasi ideologis yang sedang terjadi pada ummat Islam. Dampak gerakan pembaharuan yang dimotori oleh Nurcholis Madjid, yang mengusung gerakan Islam kultural yang mementingkan substansi daripada formalistik dari ajaran Islam dalam kehidupan bangsa dan negara memberikan pengaruh pada umat Islam. Mereka tampaknya tidak lagi mementingkan simbol-simbol Islam tetapi lebih pada substansi ajaran Islam.

Di kalangan kaum nahdhiyin (NU) juga, akibat gerakan kultural KH.

Abdurahman Wahid, terjadi pergeseran orientasi ideologis. Mereka, sama seperti apa yang diinginkan oleh kelompok pembaharu, tidak menginginkan formalisme Islam dalam negara. Sehingga tidak heran kemudian di kalangan NU ada kelompok besar yang tidak lagi membentuk partai Islam tetapi partai yang berwawasan kebangsaan, yaitu PKB. Dalam hal ini mereka lalu tidak lagi mendukung Piagam Jakarta, meskipun sebelumnya pada tahun 1950-an mereka (kalangan NU) masih gigih memperjuangkan Piagam Jakarta.

Pandangan dan sikap Partai Keadilan (PK) juga perlu diperhatikan. Partai ini, yang dianggap sebagai partai yang diilhami oleh gerakan Ikhwanul Muslimin (Mesir) dan Jama'at Islami (Pakistan), tidak memberikan dukungan terhadap perjuangan PPP dan PBB. Sebaliknya ia memberikan alternatif lain sebagai jalan tengah untuk mencairkan kebekuan, yaitu dengan mengusulkan Piagam Madinah, suatu piagam kesepakatan yang dibuat oleh Nabi Muhammad ketika bersepakat untuk membentuk masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama.

Dukungan Pemilih Islam terhadap Partai Politik Islam

Pemilu 1999 merupakan momentum untuk membuktikan apakah partai-partai Islam akan mendapatkan dukungan dari konstituennya, yakni umat Islam yang mencapai 90% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 120 Juta orang. Pada Pemilu 1999, partai Islam yang bertarung untuk memperebutkan konstituen (pemilih) Islam ada 17 partai. Ke-17 partai politik Islam tersebut yaitu PPP, PBB, PK, PP, PUI, PMB, PPIM, PID, PIB, PSII, PSII 1905, PNU, PKU, SUNI, KAMI, PAY, dan PUMI.

Saat hasil Pemilu 1999 diumumkan, perolehan suara partai-partai Islam merosot jauh. Dari 17 partai Islam, hanya PPP yang masuk lima besar dengan memperoleh suara 10,72% (59 kursi).

Sedangkan sebagian besar partai Islam lainnya tidak memperoleh suara yang signifikan untuk meraih satu kursipun di DPR. Partai Bulan Bintang (PBB) yang dianggap sebagai pewaris utama dari Masyumi hanya meraih 1,9% suara atau 13 kursi, sementara Partai Keadilan hanya mampu mengumpulkan suara 1,4% (7 kursi). Beberapa partai Islam lainnya seperti Partai Nahdlatul Ummah (NU), Partai Persatuan (PP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), PPI Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat (PKU) hanya memperoleh masing-masing satu kursi. Sedangkan sejumlah partai Islam lainnya tidak mampu meraih dukungan untuk mendapatkan kursi di DPR. Partai-partai Islam yang tidak memperoleh kursi ini layak disebut sebagai “partai desimal”, karena memperoleh suara kurang dari satu persen.

Hasil Pemilu 1999 yang menunjukkan kekalahan atau kegagalan partai-partai Islam tersebut sangat menarik mengingat mayoritas pemilih 90% adalah umat Islam. Meski ada seruan MUI dan elit-elit Islam untuk memilih partai-partai Islam dan tidak boleh memilih partai-partai yang mayoritas calegnya non-Muslim, ternyata hal itu tidak dihiraukan oleh massa Islam, terutama massa Islam kalangan akar rumput (*grass root*).

Kekalahan atau kegagalan partai-partai Islam pada Pemilu ini menarik pula karena terjadi pada sikap antusiasisme para pemimpin Islam yang sangat percaya diri akan kemampuan merebut suara mayoritas dari penduduk negeri ini. Ini terlihat dari keyakinan para pemimpin partai yang masing-masing mengklaim akan mendapat dukungan yang banyak dari umat Islam. PPP, misalnya, yakin akan dapat mempertahankan perolehan suaranya seperti dicapai pada Pemilu 1997, yaitu sebesar 22%. Sementara PK yakin akan mendapat dukungan suara sekitar 10-15%.³⁰

³⁰ Lihat dalam buku, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, (Jakarta: LKIS, 1999).

Tabel 1. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Islam Dalam Pemilu 1999

No	Partai Politik	Suara	%	Kursi
1	PPP	11.329.905	10,72	58
2	PBB	2.049.708	1,94	13
3	PK	1.436.565	1,36	7
4	PNU	679.179	0,64	5
5	PP	551.028	0,52	1
6	PPI	456.718	0,43	1
	Masyumi			
7	PSII	375.920	0,36	1
8	PKU	300.064	0,28	1
9	KAMI	289.489	0,27	0
10	PUI	269.309	0,25	0
11	PAY	213.979	0,20	0
12	PIB	192.712	0,18	0
13	SUNI	180.167	0,17	0
14	PSII 1905	152.820	0,14	0
15	PMB	152.589	0,14	0
16	PID	62.901	0,06	0
17	PUMI	49.839	0,05	0

Sumber: Diolah dari *Kompas*, 1999.

Tetapi, seperti terlihat pada tabel di atas, partai-partai Islam mayoritas tidak memperoleh dukungan yang signifikan. Dukungan suara pemilih Islam terhadap partai-partai Islam ternyata “sangat” sedikit. Akibatnya, sebanyak sembilan partai politik Islam (KAMI, PUI, PAY, PIB, SUNI, PSII 1905, PMB, PID, dan PUMI) tidak memperoleh satu kursi pun di DPR; sebanyak empat partai Islam (PP, PPI Masyumi, PSII, dan PKU) hanya memperoleh satu kursi di DPR, sedangkan PNU dan PK masing-masing memperoleh lima dan tujuh kursi. Dari ke 17 partai Islam yang ikut Pemilu, hanya PPP (58 kursi) dan PBB (13 kursi) yang lolos *electoral threshold*. Sedangkan yang lainnya, yaitu sebanyak 15 partai Islam tidak lolos *electoral threshold*.

Sementara partai yang berbasiskan massa Islam yaitu PKB dan PAN masing-masing memperoleh suara 12,6 % dan 7,1%. Sedangkan, partai-partai sekuler pluralis banyak mendapat dukungan rakyat. PDIP sebagai partai sekuler keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara 33,8% (153 kursi), kemudian disusul Partai Golkar dengan memperoleh suara 22,5% (120 kursi). Kemenangan partai-partai tersebut sudah diduga sebelumnya. Banyak analisis yang sudah memperkirakan bahwa partai-partai tersebut di atas akan menjadi

partai-partai yang berpeluang besar dalam perolehan suara.³¹

Dalam menghadapi Pemilu 2004, tampaknya untuk sebagian besar kalangan elit Islam belum atau bahkan tidak menyadari³² relatifnya kecilnya dukungan umat Islam terhadap partai-partai Islam. Ini tercermin dari bukannya mereka (partai-partai Islam) itu bergabung menjadi satu atau hanya beberapa partai Islam, katakanlah tiga partai Islam yang mewakili kalangan tradisionalis, modernis, dan revivalis, sebaliknya mereka tetap “*mempermak*” kembali partainya dengan nama baru. Sebagian lagi bahkan, akibat perpecahan internal, mendirikan partai politik baru. Sebut saja, misalnya, PBR dan PPP Reformasi merupakan partai baru hasil konflik internal dalam tubuh PPP. Sementara lahirnya PAS dan PII produk konflik internal dalam tubuh PBB.

Baik partai-partai Islam yang “*dipermak*” kembali maupun lima partai-partai Islam yang lahir dari produk konflik internal, yang lolos verifikasi hanya lima, yaitu terdiri dari dua partai Islam (PPP dan PBB) yang lolos *electoral threshold*, dua partai Islam (PKS dan PPNU) dengan nama baru karena tidak lolos *electoral threshold*, dan satu (PBR) produk konflik internal PPP.³³ Dengan demikian, partai Islam yang ikut Pemilu 2004 hanya lima partai, yaitu PPP yang dipimpin oleh Hamzah Haz, PBB yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, PKS yang dipimpin

oleh Hidayat Nur Wahid, PPNU yang dipimpin oleh Syukron Ma'mun, dan PBR yang dipimpin oleh KH Zaenuddin MZ.

Jumlah partai Islam yang hanya lima itu tentu saja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai Islam pada Pemilu 1999 yang mencapai 17 partai Islam. Dengan jumlah yang sedikit itu, di dalam benak mereka tentu ada harapan bahwa partainya akan memperoleh dukungan yang besar dari pemilih Islam. Dalam konteks itu, tidak heran kemudian mereka pun lalu memiliki keyakinan yang besar bahwa mereka akan mendapat dukungan dari pemilih Islam. Keyakinan itu tercermin, seperti juga pada Pemilu 1999, mereka memasang target yang relatif besar dalam perolehan suara pada Pemilu 2004. PPP, misalnya, memasang target antara 20% sampai 30%.³⁴ PBB memasang target 25% dan membawa PBB sebagai tiga besar partai pemenang Pemilu 2004.³⁵ PBR dalam menghadapi Pemilu 2004 menargetkan suara sekitar 20% atau menjadi pemenang lima besar.³⁶ PPNU mempunyai target perolehan suara 3% hingga 4% untuk DPR, 5% dari kursi DPRD Propinsi, dan 6% jumlah kursi DPRD Kabupaten/ Kota.³⁷

Mencermati target dari masing-masing partai Islam itu menunjukkan mereka cukup percaya diri (atau malah sebaliknya *over confidence*) bahwa, sekali lagi, partai-partai Islam pasti akan mendapat dukungan yang besar dari pemilih Islam. Namun bila kita memperhatikan target yang mereka canangkan, jika digabung, ternyata melebihi jumlah umat Islam di Indonesia itu sendiri yang mencapai kurang lebih 89% dari 120 juta penduduk Indonesia. Ini sesuatu yang ironis dan tidak masuk akal. Dengan kata lain, ternyata mereka dalam menentukan target tersebut tidak cukup realistis, bahkan bertentangan dengan fakta (jumlah umat Islam di Indonesia) yang ada.

³¹ Lihat dalam buku, *5 Partai Dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).

³² Mungkin sebaliknya, mereka sesungguhnya sangat sadar dan tahu. Apabila hal ini yang benar berarti motif mendirikan partai Islam bukan untuk kepentingan umat melainkan kepentingan kekuasaan itu sendiri.

³³ Partai Islam yang tidak lolos verifikasi KPU ada tiga yaitu Partai Islam pimpinan H. Andi Rasyid Djalil, Partai Islam Indonesia pimpinan HM Tohir Ashary, dan PPP Reformasi pimpinan HM Saleh Khalid. Sebagian besar partai Islam yang lain tidak memenuhi persyaratan dan/atau dibatalkan sebagai badan hukum. Lihat Tim Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004).

³⁴ *Ibid.*, hlm.100.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 338.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 225.

Selain mereka tidak realistis, tampaknya mereka pun kurang atau tidak berkaca pada perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 1999 yang lalu, di mana sebagaimana dalam tabel di atas, hasil partai-partai Islam “jeblok”. Berdasarkan argumentasi ini, dengan demikian bahwa target yang mereka canangkan itu sesungguhnya “jauh panggang dari api”.

Dalam konteks di atas kemudian pertanyaan yang muncul: dari mana mereka mendasarkan pencapaian target sebanyak itu? Apakah terkait dengan jumlah partai Islam yang sedikit? Memang bila dikaitkan dengan jumlah partai Islam, pada Pemilu 2004 jumlahnya semakin sedikit, hanya 5 parpol Islam. Akan tetapi pengurangan jumlah partai Islam yang maju dalam Pemilu 2004 bukan karena faktor kesadaran para elit Islam itu sendiri untuk bergabung menjadi beberapa partai Islam, tetapi lebih pada faktor eksternal yaitu di mana partai-partai Islam banyak yang tidak lolos sebagai badan hukum dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Banyaknya partai Islam yang tidak lolos sebagai badan hukum dan tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan KPU, sebenarnya menunjukkan bahwa partai Islam itu sendiri kurang mendapat dukungan dari umat Islam. Seharusnya hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi partai-partai Islam dalam menentukan target di atas yang lebih realistis. Pertimbangan yang lain harus ditujukan kepada keberadaan partai-partai nasionalis sekuler, sosialis, dan partai-partai yang berbasiskan massa Islam itu sendiri (PKB dan PAN). Yang disebut terakhir ini, dukungan dari umat Islam, terutama NU dan Muhammadiyah relatif besar bahkan signifikan.

Target yang besar dari masing-masing partai Islam tersebut di atas, berdasarkan hasil Pemilu 2004 ternyata betul-betul “jauh panggang dari api”, tidak realistis dan *over confidence*. Dari lima partai Islam yang ikut Pemilu 2004, PPP memperoleh suara 8,15%, PKS mendapat dukungan suara 7,34%, PBR 2,44%, PBB 2,62%, dan PPNUI 0,79%. Berdasarkan

jumlah dukungan suara dari masing-masing partai Islam itu, terlihat hanya PKS saja yang naik suaranya sedangkan partai Islam lainnya turun. PPP yang pada Pemilu 1999 mendapat dukungan dari pemilih Islam 10,72%, pada Pemilu 2004 ia hanya memperoleh 8,15%. PPNUI, meskipun perolehan suaranya naik dari 0,64% pada Pemilu 1999 menjadi 0,79% pada Pemilu 2004, tetapi ia tidak memperoleh kursi satu pun, padahal pada Pemilu 1999 ia mendapat 5 kursi di DPR. Begitu pun dengan PBB, yang pada Pemilu 1999 memperoleh 1,94% naik menjadi 2,62%. Namun ia dalam perolehan kursinya menjadi berkurang, dari 13 kursi menjadi 11 kursi di DPR. Bukan itu saja, ternyata PBB “tereliminasi” dari Pemilu 2009 karena ia tidak lolos *electoral threshold*, padahal pada Pemilu 1999 ia lolos *electoral threshold*. Sedangkan PBR, sebagai partai baru pecahan dari PPP, meski dipimpin oleh Dai Sejuta Umat, KH Zaenuddin MZ, tampaknya tidak sepopuler atau dikenal seperti KH. Zaenuddin MZ itu sendiri, sehingga ia hanya memperoleh 2,44% atau 13 kursi di DPR. Dengan demikian, sama dengan PPNUI dan PBB, PBR juga tidak lolos *electoral threshold*.

Tabel 2. Perolehan Suara dan Kursi Partai Islam Pada Pemilu 2004

No	Nama Partai	Suara		Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	PPP	9.248.764	8,15	58	10,55
2	PKS	8.325.020	7,34	45	8,18
3	PBR	2.764.998	2,44	13	2,36
4	PBB	2.970.487	2,62	11	2,00
5	PPNUI	895.610	0,79	0	0,00
Jumlah		24.204.879	21,34	127	23,09

Sumber: Diolah dari Hasil Pemilu 2004 Rapat KPU 5 Mei 2004.

Kurangnya dukungan partai-partai Islam di atas, menunjukkan bahwa ternyata partai Islam “kurang laku” di mata pemilih Islam. Pemilih Islam ternyata lebih memilih partai-partai non-Islam. Partai Golkar, yang pada Pemilu 1999 dihujat, pada Pemilu 2004 ini memperoleh suara

21,58%, PDIP memperoleh dukungan 18,53%, dan PD, sebagai partai baru, mendapat dukungan cukup “fantastis” yaitu 7,45%. Partai-partai tersebut bila digabung perolehan suaranya mencapai 53,45%. Sementara partai yang berbasiskan massa Islam (NU dan Muhammadiyah) masing-masing PKB memperoleh suara 10,57% dan PAN 6,44%, yang bila mereka digabung perolehan suaranya mencapai 18,90%.

Dengan menurunnya jumlah dukungan pemilih Islam terhadap partai Islam di satu sisi dan besarnya jumlah suara yang diperoleh partai-partai non-Islam di sisi lain memperlihatkan bahwa para pemilih Islam tidak lagi tertarik pada partai-partai Islam, yang masih mengusung formalisme Islam, termasuk di dalamnya perjuangan menegakkan syariat Islam (Piagam Jakarta). Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei itu menunjukkan mereka yang memilih PKS, ternyata mayoritas karena alasan program/*platform* (53%), bukan pada partai Islam (18%), pemimpin (18%), keluarga (4%), dan lain-lain (7%). Dengan demikian, mereka yang memilih PKS bukan faktor Islamnya tetapi lebih pada program-program yang diusungnya.

Pada Pemilu 2004 ini perolehan suara PKS mencengangkan semua kalangan, termasuk para pengamat baik dalam negeri maupun dari luar negeri (Indosianist). PKS, yang merupakan salah satu partai Islam yang dipimpin, dan terdiri dari kalangan anak muda dari Kampus, pada Pemilu 1999 yang hanya memperoleh 1,36% suara atau 7 kursi di DPR, pada Pemilu 2004 ini ia memperoleh suara 7,34% atau memperoleh 45 kursi di DPR. Bukan hanya itu, di Jakarta sebagai ibukota Indonesia dan barometer, PKS keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 18 kursi, mengalahkan PDIP yang pada Pemilu 1999 keluar sebagai pemenang.

Dengan kenaikan suara yang fantastis itu, PKS (bersama PD) mendapat julukan baru dari kalangan pengamat yaitu sebagai partai “*rising stars*”. Bahkan bukan

hanya itu saja, mereka itulah yang sesungguhnya keluar sebagai “pemenang” pada Pemilu 2004 ini, bukan Partai Golkar. “Kemenangan” kedua partai itu dinilai sebagai sebuah sanksi dari para pemilih Indonesia terhadap partai-partai lama yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat dengan memberikan dukungan kepada PKS dan PD. Selain itu, PKS selama kiprahnya di dunia politik dikenal sebagai partai yang bersih dan memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas KKN. Komitmen itu bukan hanya janji tetapi juga dengan bukti melalui perilaku dan sikap para kadernya yang duduk di lembaga perwakilan (DPR dan DPRD).

Dengan demikian, faktor kemenangan PKS tidak lepas dari kebijakan politik ganda yang diperankan oleh PKS, yaitu Islamisme dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai partai Islam, PKS tetap mengusung nilai-nilai Islam sebagai kehidupan politik di Indonesia. Dalam mengusung ini, ia menyebutnya sebagai “Partai Dakwah”. Sedangkan dalam mengusung program pemerintahan yang baik, PKS mendasarkan pada partai yang bersih dan jujur. Dua faktor ini yang lalu menjadi daya tarik bagi pemilih untuk memilih PKS. Namun demikian, mereka yang memilih PKS sebagian besar dari pemilih partai-partai Islam atau partai yang berbasis Islam itu sendiri bukan berasal dari basis dukungan PDIP maupun Golkar. Mereka yang kecewa pada PDIP, dukungannya diberikan kepada PD. Sedangkan dukungan terhadap PKS diperoleh dari mereka yang kecewa terhadap PAN, PBB dan PPP.

Terlepas dari naiknya perolehan suara PKS yang cukup fantastis itu, secara keseluruhan dukungan pemilih Islam terhadap partai Islam masih relatif sedikit. Dalam kaitan ini ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan tentang relatif sedikitnya dukungan pemilih Islam terhadap partai-partai Islam. *Pertama*, estimasi berlebihan dari kekuatan politik Islam di mana para elit Islam dengan yakin bahwa umat Islam Indonesia yang mayoritas ini akan secara otomatis mendukung partai Islam.

Estimasi dan optimisme itu jauh dari kenyataan. Ada kesenjangan antara angka sosiologis dan angka politik. Memang, secara sosiologis umat Islam Indonesia mayoritas, tetapi realitas politik mereka (umat Islam) dalam mendukung partai Islam tidak sebanding dengan jumlah umat Islam itu sendiri, bahkan hanya sebagian kecil saja. Pada Pemilu 1955, partai-partai Islam hanya memperoleh suara 43,9%, Pemilu 1971 turun menjadi 27,3%, Pemilu 1977 naik menjadi 29,3%, Pemilu 1982 turun kembali menjadi 27,8%, Pemilu 1987 turun lagi menjadi 16,0%, Pemilu 1992 tetap 16,0%, Pemilu 1997 naik menjadi 22,0, Pemilu 1999 (di luar PAN dan PKB) turun menjadi 17,8% dan Pemilu 2004 naik menjadi 21,17%. Meskipun jumlah suara dukungan partai-partai Islam naik-turun tetapi perolehan suara mereka tidak dapat menyamai perolehan suara pada Pemilu 1955. Ini mengindikasikan bahwa dukungan umat Islam terhadap partai Islam terus menurun. Dengan demikian, para elit Islam masih terjebak dalam “mitos politik kuantitas”. Pandangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam akan berbanding lurus dengan sikap pilihannya sehingga dengan serta merta mereka akan memilih partai Islam. Ternyata mitos tersebut tidak sampai pada realita.

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Islam Selama Pemilu 1955-2004

Pemilu	Partai	Suara (%)
1955	Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI	43,9
1971	NU, Parmusi, PSII, Perti	27,1
1977	PPP	29,3
1982	PPP	27,8
1987	PPP	16,0
1992	PPP	16,0
1997	PPP	22,0
1999	PPP, PBB, PK, PNU, PP, PPI, Masyumi, PSII, PKU, KAMI, PUI, PAY, PIB, SUNI, PSII 1905, PMB, dan PID*	17,8
2004	PPP, PBB, PKS, PBR, dan PPNU	21,17

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

*) PAN dan PKB tidak masuk sebagai kategori partai Islam karena kedua partai

tersebut tidak berdasarkan pada asas Islam meski basis dukungannya pemilih Islam.

Kedua, merosotnya dukungan umat Islam terhadap partai Islam ini terkait juga dengan keberadaan umat Islam itu sendiri yang sebagian besar bersifat sosiologis daripada ideologis sehingga mereka (umat Islam) memiliki pandangan yang berbeda terhadap Islam sebagai sebuah ideologi (dengan perwujudannya melalui pembentukan partai politik Islam). Apabila mengikuti tipologi Geertz, umat Islam Indonesia terdiri atas Islam santri dan Islam abangan. Yang disebut terakhir mempunyai pandangan bahwa agama harus terpisah dari urusan-urusan politik. Sementara di kalangan santri sendiri terjadi fragmentasi juga dalam memandang hubungan Islam dan politik, ada yang bersifat substansialis dan ada yang formalis. Mereka yang substansialis cenderung mendukung partai-partai non-Islam.

Ketiga, terkait dengan faktor kedua, hal itu terjadi karena di kalangan umat Islam telah terjadi perubahan orientasi dalam pandangan politiknya. Akibat modernisasi yang dilakukan pemerintah dan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Nurcholis Madjid, membawa dampak terhadap cara pandang umat Islam yang tidak lagi terikat dengan simbol-simbol ke-Islaman. Umat tidak lagi melihat partai Islam sebagai representasi ke-Islaman, tetapi yang dilihat sejauh mana suatu partai menerapkan nilai-nilai ke-Islaman. Jadi yang dipentingkan oleh umat adalah substansi bukan formalisme. Mereka tidak melihat label apa yang dipakai suatu partai tetapi lebih melihat sejauhmana suatu partai memperjuangkan, misal, tentang demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, keterbukaan, dan lain-lain.

Keempat, partai-partai politik yang ada terfragmentasi dan terpecah-pecah dalam kekuatan-kekuatan kecil. Dengan banyaknya partai Islam tersebut membingungkan umat Islam. Selain itu dengan terfragmentasi dan terpecah-pecahnya partai-partai Islam dengan sendirinya mem-

perlemah partai Islam itu sendiri sebagai sebuah kekuatan politik. Tampaknya fragmentasi ini tidak lepas dari akar historis kekuatan politik Islam Indonesia pada masa pergerakan, meski kemudian pada awal kemerdekaan dicoba dalam satu kekuatan politik, tetapi kemudian hal itu tidak berlangsung lama. Pada masa Orde Baru, dengan kekuatan eksternal dipaksa untuk bersatu dalam wadah PPP tetapi di dalamnya tidak luput didera konflik internal yang menyebabkan NU ke luar dari PPP. Akar historis itu mendapatkan lahan subur pada era reformasi ini di mana begitu banyak partai Islam berdiri.

Kelima, kegagalan partai-partai Islam berkaitan dengan proyek modernisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang pada gilirannya akibat modernisasi tersebut melahirkan pandangan yang pragmatis dan sekuler di kalangan umat Islam. Akibat modernisasi terjadi transformasi sosial-ekonomi di kalangan umat Islam, terutama kalangan kelas menengah atau terdidik. Mereka ini kemudian dalam pandangan politik terjadi pergeseran orientasi, yang tadinya bersifat formalistik dalam memandang hubungan antara agama dan politik menjadi bersifat substansialistik di mana Islam cukup sebagai pedoman etik dan moral dalam mewarnai kehidupan bangsa dan negara.

Penutup

Pada era reformasi muncul kembali partai politik yang berasas Islam (partai Islam). Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan kembali partai-partai Islam tersebut. **Pertama**, faktor teologis yang melahirkan doktrin bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan negara. **Kedua**, faktor sosiologis di mana umat Islam Indonesia mayoritas sehingga perlu adanya wadah untuk mereka. **Ketiga**, faktor historis di mana keberadaan partai Islam tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu di mana partai Islam telah ada dan ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia. **Kempat**, faktor reformasi yang melahirkan

kebebasan dan demokratisasi di mana setiap golongan dan kelompok dibuka peluang untuk membentuk/mendirikan partai politik.

Namun kemunculan kembali partai politik Islam tersebut mengalami perpecahan atau fragmentasi di mana partai Islam yang dibentuk atau berdiri begitu banyak (dalam bahasa AM Fatwa, satu Islam banyak partai). Tampaknya sifat fragmentasi ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kekuatan-kekuatan Islam di Indonesia semenjak zaman perjuangan dulu. Oleh karena itu tidak heran ketika dari kalangan Islam modernis lahir partai-partai politik seperti PBB, PUI, Masyumi Baru dan Partai Islam Masyumi (serta PAN yang tidak berdasarkan asas Islam tetapi nasionalis-religius). Sedangkan dari kalangan tradisional lahir partai politik seperti PKU dan PNU (di samping PKB yang tidak berdasarkan pada asas Islam namun nasionalis-religius). Sementara dari rahim Sarekat Islam, telah lahir partai politik seperti PSII dan PSII 1905.

Ketika menghadapi Pemilu 1999, partai politik Islam yang ikut pemilu adalah 17 partai. Dari jumlah tersebut, ternyata yang memperoleh kursi hanya 7 partai politik, yaitu PPP, PBB, PK, PKU, PNU, PP, dan PSII. Dari enam partai politik itu bila dijumlah secara keseluruhan hanya memperoleh suara 17 persen. Dengan demikian partai-partai politik Islam dalam Pemilu 1999 kurang mendapat dukungan dari pemilih Islam. Malahan yang keluar sebagai pemenang adalah PDI Perjuangan, yaitu sebuah partai nasionalis sekuler. Dengan demikian partai-partai Islam mengalami kekalahan dengan partai nasionalis sekuler. Begitu pun dengan Pemilu 2004, dari lima partai Islam yang ikut pemilu hanya dua yang lolos *electoral threshold* yakni PPP dan PKS.

Kekalahan partai-partai Islam itu sudah dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini karena di samping jumlah partai politik Islam yang banyak juga karena faktor elite-elite politik Islam yang mendirikan partai politik yang berorientasi nasionalis-religius dan pluralis, seperti PKB dan PAN. Kedua

partai tersebut mempunyai basis yang kuat dan besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain itu juga, di kalangan umat Islam telah terjadi perubahan ideologis di mana mereka lebih melihat substansi Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam.

Argumentasi tersebut di atas semakin mendapat justifikasi, terlihat dari menurunnya dukungan umat Islam terhadap PPP dan PBB, padahal kedua partai ini mengusung syari'at Islam dalam perjuangannya. Sementara itu, PKS meski sebagai partai Islam tidak mengusung tema-tema Islam yang membuat orang takut tetapi pada tema-tema yang selama ini menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, penegakan keadilan dan kejujuran. Kenaikan suaran PKS pada Pemilu 2004, saya kira, tidak lepas dari strategi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan, tema-tema yang bersifat keagamaan tampaknya kurang menarik lagi bagi pemilih Islam, sebaliknya menginginkan tema-tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat selama ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta, LP3ES, 1987.
- Anwar, M. Syafii. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta, Paramadina, 1995.
- Abdul Mu'nim D.Z. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta, Kompas, 2000.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam*. Jakarta, Mizan, 1986.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta, Paramadina, 1999.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori. *Ekspresi Politik Muslim*. Bandung, Mizan, 1998.
- El-Affendy Abdelwahab. *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta, LKiS, 1994.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara*. Jakarta, Paramadina, 1998.
- Feith, Hebert. *The Indonesian Election of 1955*. Ithaca, Cornell University Press, 1957.
- Gulalp, Halil. "Political Islam in Turkey: The Rise and Fall of The Rifah Party". *The Muslim World*. Hartford Seminary, Vol.89, No.1, 1999.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*. Bandung, Mizan, 1996.
- Harahap, Syahrin. *Al-Qur'an dan Sekularisme: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thoha Husein*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.
- Hasan, Muhammad Kamal. *Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta, Lingkaran Studi Indonesia, 1987.
- Liddle, R. William. *Islam, Politik, dan Modernisasi*. Jakarta, Gramedia, 1996.
- Madjid, Nurcholis. *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung, Mizan, 1987.
- Mulkham, Abdul Munir. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Jakarta, 1994.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta, Grafitipers, 1987.
- Suhelmi, Ahmad. *Natsir Vs Soekarno*. Jakarta, Darul Falah, 2000.
- Sumartana, Th. "Politik Islam dan Pluralisme Bangsa", *Majalah D&R*, 15 Agustus 1998.
- Subhan, Arief. ed. *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta, LSAF, 1999.

- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta, LP3ES, 1985.
- Syamsuddin, Din "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam". *Ulumul Qur'an*, Vol.4, No.2, 1993.
- Tamara, Nasir. "Sejarah Politik Islam Orde Baru", *Prisma*, No.5/1988.
- Tim Kompas. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.